

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019)**

***THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT AND
ACCESSIBILITY FINANCIAL STATEMENT ON REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT ACCOUNTABILITY***

***(Case Study in the Regional Financial Management Agency of West Bandung Regency in
2019)***

Alifia Ulfa Rosalia¹, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., AK., CA²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

¹alifiaulfar@student.telkomuniversity.ac.id, ²srirahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta pengawasan yang harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kegagalan ataupun kesuksesan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terwujud pemerintah daerah harus memberikan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan kepada publik dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampel menggunakan *non-probability sampling* melalui sampel jenuh. Data yang diolah adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 20. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Abstract

Accountability of regional financial management is a procedure of regional financial management starting from planning, implementation, accountability, reporting, and supervision that must be reported and accounted to the public and DPRD to measure failure or success as a consideration for the following year. In order for the accountability of regional financial management to be realized the local government must provide a good presentation of financial statements and the accessibility of financial statements to the public. This study aims to determine the effect of the presentation of financial statements and the accessibility of financial statements to the Regional Financial Management Accountability at the Regional Financial Management Agency of West Bandung Regency in 2019. This study uses a sample technique using non-probability sampling through saturated samples. The data processed is primary data through questionnaires. The data analysis model used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS version 20. This research shows that the presentation of financial statements and the accessibility of financial statements have a significant positive effect simultaneously on the accountability of regional financial management. The presentation of financial statements partially has a significant positive effect, and the accessibility of financial statements partially has a significant positive effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: Regional Financial Reports, Regional Financial Reports, and Regional Financial Management Accountability.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah daerah patut mengelola keuangan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Agar akuntabilitas terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang lengkap di dalam laporan keuangan. Selain itu, diperlukan juga aksesibilitas laporan keuangan daerah yang efektif.

Namun, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat masih diperlukan adanya peningkatan kembali terhadap pengelolaan keuangan, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan predikat WDP pada tahun 2018 yaitu masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset yang belum tertata, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai, serta rincian aset yang sulit untuk ditelusuri karena tidak didukung dengan presensi fisiknya. Hal yang menjadikan akun aset selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat adalah penyaluran dan pertanggungjawaban belanja, belum komprehensifnya kerangka kebijakan, inefisiensi, keterbatasan data dan keterbatasan SDM yang berkompeten. Hal ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat gagal mendapatkan predikat WTP dari BPK^[1].

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory merupakan hubungan yang dilakukan atas dasar kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) dan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa pemegang saham^[10].

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut^[3], akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta pengawasan yang harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kegagalan ataupun kesuksesan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pertanggungjawaban, 4) Pelaporan, dan 5) Pengawasan.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: (1) Relevan (2) Andal (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami^[2].

Penyajian laporan keuangan merupakan kewenangan publik yang patut diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan efektif ketika transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan disajikan dengan lengkap dan reliabel dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Suatu kejelasan pengelolaan keuangan suatu entitas memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran yang diberikan akan menjadikan penyajian laporan keuangan lebih efektif^[3]. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti terdahulu^[4,5] yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H1: Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan secara parsial.

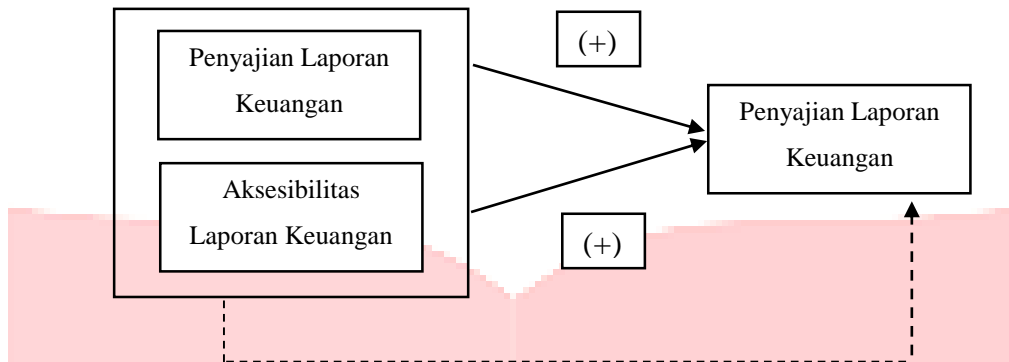
2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan fasilitas bagi seseorang agar dapat mengetahui dan mendapatkan informasi laporan keuangan dengan mudah^[3]. Akuntabilitas yang efektif dipengaruhi oleh akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan hasil pemeriksaan^[3]. Indikator dalam aksesibilitas laporan keuangan yaitu: 1) Keterbukaan, 2) Kemudahan, dan 3) *Accesible*^[2].

Jika semakin memadai fasilitas akses laporan keuangan yang diberikan kepada para pengguna maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat meningkat. Para pengguna akan mampu mengawasi pertanggungjawaban pemakaian aset daerah dan prosedur keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah jika diberikan fasilitas akses secara terbuka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu^[2,8] yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan secara parsial.

Berlandaskan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, adapun model kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data yang telah diolah (2020)

2.2 Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagian dan Sub Bagian di Bidang Pelaksana Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 35 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *sampling* jenuh. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis rstatistika deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji simultan (Uji F), koefisien deteminasi (R^2), dan uji parsial (Uji t).

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul^[3]. Deskriptif variabel dari penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penilaian dan tanggapan responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
Penyajian Laporan Keuangan	1575	1049	67%	Baik
Aksesibilitas Laporan Keuangan	525	332	63,2%	Cukup Baik
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1400	911	65%	Cukup Baik

Sumber: Data yang telah diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam kuisisioner pada semua variabel dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik karena persentase yang dihasilkan berada di interval $\geq 52\%$ - 68%.

3.2 Uji Asumsi Klasik
 3.2.1 Uji Normalitas

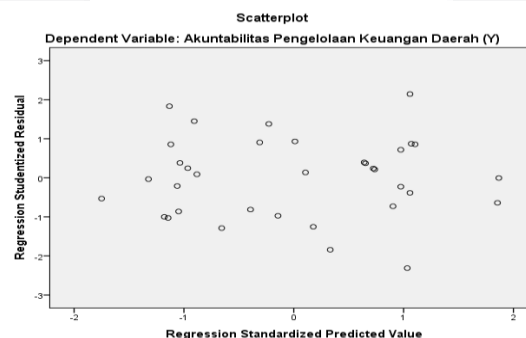
Tabel 3.2 Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.17110206
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.059
Test Statistic		.357
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data yang telah diolah (2020)

Hasil pengujian normalitas data berdasarkan uji Normal Kolmogorov Smirnov menyatakan bahwa data memiliki nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 1,000 yaitu lebih besar dari 0,05. Maka pada penelitian ini data tersebut dapat disimpulkan telah berdistribusi normal.

3.2.2 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2.2 Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang telah diolah (2020)

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga model tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model, residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain memiliki variansi yang sama atau konstan.

3.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penyajian Laporan Keuangan (X1)	.453	2.209
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	.453	2.209

Sumber: Data yang telah diolah (2020)

Menurut hasil perhitungan SPSS, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel <10,00, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini. Hal tersebut berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat atau tidak adanya keterkaitan antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil *output* program *Statistical Program for Society Science* (SPSS) 20 diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.431 + 0,494PLK + 0,916ALK$$

Persamaan tersebut akan muncul apabila perkiraan variabel bebas (X) naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan sama dengan nol atau konstan, maka nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

- Konstanta sebesar 3.431 dan bertanda positif yang dapat diartikan jika penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan bernilai 0, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan bernilai konstan.
- Penyajian Laporan Keuangan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,494 bertanda positif yang berarti jika penyajian laporan keuangan mengalami peningkatan tiap 1 (satuan) dan variabel independen lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,916 bertanda positif yang berarti jika penyajian laporan keuangan mengalami peningkatan tiap 1 (satuan) dan variabel independen lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.778	.764	3.26870
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Penyajian Laporan Keuangan(X1)				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)				

Sumber : Data yang telah diolah (2020)

Hasil tabel diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,764 atau 76,4%. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 76,4% menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) memberikan pengaruh secara simultan 76,4% terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Sedangkan sisanya sebesar 23,6% merupakan kontribusi dari faktor lain selain Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1195.986	2	579.993	55.969	.000 ^b
	Residual	341.900	32	10.684		
	Total	1537.886	34			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)						
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Penyajian Laporan Keuangan (X1)						

Sumber : Data yang telah diolah (2020)

Hasil tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$.

Dengan demikian, jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

3.4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.470	.151
	Penyajian Laporan Keuangan (X1)	4.423	.000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	3.194	.003

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : Data yang telah diolah (2020)

Hasil perhitungan untuk hipotesis pertama yaitu variabel penyajian laporan keuangan (X_1) diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka, H_0 ditolak yang berarti secara parsial variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung Barat.

Hasil perhitungan untuk hipotesis kedua yaitu variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,005 atau $0,003 < 0,05$. H_0 ditolak yang berarti secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung Barat.

4. Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara simultan variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dari tabel koefisien determinasi berganda dengan *Adjusted R Square* mendapatkan nilai 0,764 atau 76,4% dan menandakan bahwa kemampuan variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi didalamnya. Tetapi, sisanya 23,6% merupakan kontribusi dari faktor selain Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6 didapatkan nilai signifikansi yaitu $0,000$ atau $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berarti jika penyajian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan karakteristik laporan keuangan, maka akan berkaitan terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan efektif ketika transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan disajikan dengan lengkap dan reliabel dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Suatu kejelasan pengelolaan keuangan suatu entitas memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran yang diberikan akan menjadikan penyajian laporan keuangan lebih efektif.

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistika deskriptif mengenai tanggapan responden terhadap variabel penyajian laporan keuangan sebesar 67% menandakan bahwa penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat sudah tergolong baik dengan indikator yang diberikan. Meskipun variabel penyajian laporan keuangan telah berada pada kategori baik secara keseluruhan tetapi terdapat item pernyataan yang memiliki persentase terendah daripada item pernyataan

lainnya, pada indikator relevan yaitu terhadap laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini sebesar 64%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh^[4,5] yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.2.1 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang ditunjukkan pada Tabel 6 didapatkan nilai signifikansi yaitu 0,003 atau $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berarti semakin memadai fasilitas akses laporan keuangan yang diberikan kepada para pengguna maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat. Para pengguna akan mampu mengawasi pertanggungjawaban pemakaian aset daerah dan prosedur keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah jika diberikan fasilitas akses secara terbuka.

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistika deskriptif mengenai tanggapan responden terhadap variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 63,2% menandakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat sudah tergolong cukup baik dengan indikator yang diberikan. Meskipun variabel aksesibilitas laporan keuangan telah berada pada kategori cukup baik secara keseluruhan tetapi terdapat item pernyataan yang memiliki persentase terendah daripada item pernyataan lainnya, pada indikator keterbukaan yaitu terhadap laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sebesar 57,1%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh^[2,8] yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019). Penulis melalui metode analisis statistika deskriptif dan analisis regresi linier berganda memperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori baik dengan skor tanggapan rata-rata sebesar 67%, Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor tanggapan rata-rata sebesar 63,2% dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor tanggapan rata-rata sebesar 65%. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Penyajian Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan mengenai penelitian akuntansi khususnya bagian akuntansi sektor publik yang menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya, seperti kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal. Selain itu, karena adanya keterbatasan waktu, peneliti selanjutnya sebaiknya juga dapat memperluas objek penelitian, agar sampel dan responden yang diperoleh lebih banyak. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian yang lain, seperti wawancara.

5.2.2 Aspek Praktis

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai objek dalam penelitian ini, harus meningkatkan ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat

diberikan secara tepat waktu. Serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan akses secara terbuka kepada masyarakat dengan mudah agar laporan keuangan daerah dapat dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.

Daftar Pustaka

- [1] Awal, B. (2019). *PKB Dorong Pemkab Bandung Barat Benahi Aset Agar Raih WTP*. [online]. <https://www.galamedianews.com/?arsip=242355&judul=pkb-dorong-pemkab-bandung-barat-benahi-aset-agar-raih-wtp> [3 Januari 2020].
- [2] BPK. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. [online]. <https://www.bpk.go.id/ihaps> [3 Januari 2020].
- [3] Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 6, Juni 2017* ISSN : 2460-0585 .
- [4] Fikrian, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . *JOM Fekon, Vol. 4. No. 1. (Februari)* .
- [5] Guasmin, & Febrianti, D. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sinar Manajemen ISSN 2337-8743 (Print) // ISSN 2598-398X (Online) Volume 6, Nomor 2*.
- [6] Hardiningsih, P., O, R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *Jurnal Akuntansi Syariah Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, Halaman 21 - 42*.
- [7] Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *2nd CBAM (Conference in Business, Accounting, and Management) World Class Islamic University, Sultan Agung Islamic University ISSN 2302-9791.Vol.2 No. 1 May*.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
- [9] Saripujana, D., & Suriana, I. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan ISBN: 978-602-51450-1-8*.
- [10] Wiyono, G., & Kusuma, H. (2017). *Manajemen Keuangan Lanjutan (Berbasis Corporate Value Creation)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.